

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
LAYANAN JASA *FINTECH* DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 4
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

I Kadek Tampan Nova Winanda

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Untuk memberikan gambaran yang luas dan lengkap mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan jasa *Fintech* di Indonesia, berdasarkan UUPK pasal 4 Huruf A. (2) mengetahui bagaimana *Fintech* dapat memberikan solusi yang merespons kebutuhan konsumen akan kepercayaan, keamanan, privasi, layanan yang lebih baik, dan mengubah lanskap kompetitif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh kemudian dilakukan analisis hukum dengan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan sesuai dengan aturan yang ada serta relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu, kewajiban penyelenggara *fintech* dalam menjaga keamanan data pribadi sesuai dengan standar keamanan informasi, selain itu hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara transparan terkait dengan pelayanan jasa *Fintech* yang beredar di masyarakat. Dengan menetapkan standar yang jelas tentang keselamatan dan kenyamanan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik saat akan memakai layanan *Fintech* tersebut. Penggunaan data pribadi. Upaya hukum yang dikenakan terhadap pelaku Penyebaran data pribadi konsumen dalam industri *fintech* di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, berupa denda, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh penyebaran data tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Fintech*, Data Pribadi, Keamanan Informasi

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS USING FINTECH SERVICES
IN INDONESIA BASED ON ARTICLE 4 LETTER A OF LAW NUMBER 8
OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION**

By

I Kadek Tampan Nova Winanda

Law Studies Program

ABSTRACT

The purpose of this research is: (1) to provide a broad and comprehensive overview of consumer protection for users of Fintech services in Indonesia, based on Article 4 Letter A of the Consumer Protection Act (UUPK), and (2) to understand how Fintech can offer solutions that respond to consumer needs for trust, security, privacy, improved services, and reshape the competitive landscape. This research is normative in nature, using a statutory and comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained and analyzed using legal analysis techniques through document or literature studies, in accordance with applicable rules and relevant to the issues raised in this study. The findings show that Fintech providers have an obligation to protect personal data in accordance with information security standards. Additionally, consumers have the right to receive transparent information regarding the Fintech services available in the market. By establishing clear standards of safety and comfort, consumers can make more informed decisions when using Fintech services. Legal remedies against the dissemination of consumer personal data in the Indonesian Fintech industry may include legal sanctions under provisions of the Consumer Protection Act (UUPK) as well as the Personal Data Protection Act. In this case, business actors may be subject to administrative sanctions, such as fines, or criminal sanctions depending on the severity of the violation and the resulting harm from the data disclosure.

Keywords : *Consumer Protection, Fintech, Personal data, Information Security*